

Lampiran 1

Suasana demonstrasi menentang Malaysia di Jakarta, 18 September 1963



Sumber : 30 Tahun Indonesia Merdeka

Lampiran 2

Kedutaan Besar Inggris menjadi sasaran amukan massa dalam aksi Ganyang Malaysia



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 2

Sumber : 30 Tahun Indonesia Merdeka

Lampiran 3

Berita di surat kabar yang memuat tentang penemuan Dokumen Gilchrist di Rumah Peristirahatan Dubes A.S. Bill Palmer



Sumber : 30 tahun Indonesia Merdeka

Lampiran 4

Allen Pope mata-mata CIA yang bekerja untuk pemberontak PRRI-PERMESTA setelah tertangkap



Allen Pope saat disidang



Lampiran 5

Suasana sekitar Halim Perdanakusuma pada hari-hari setelah G30S



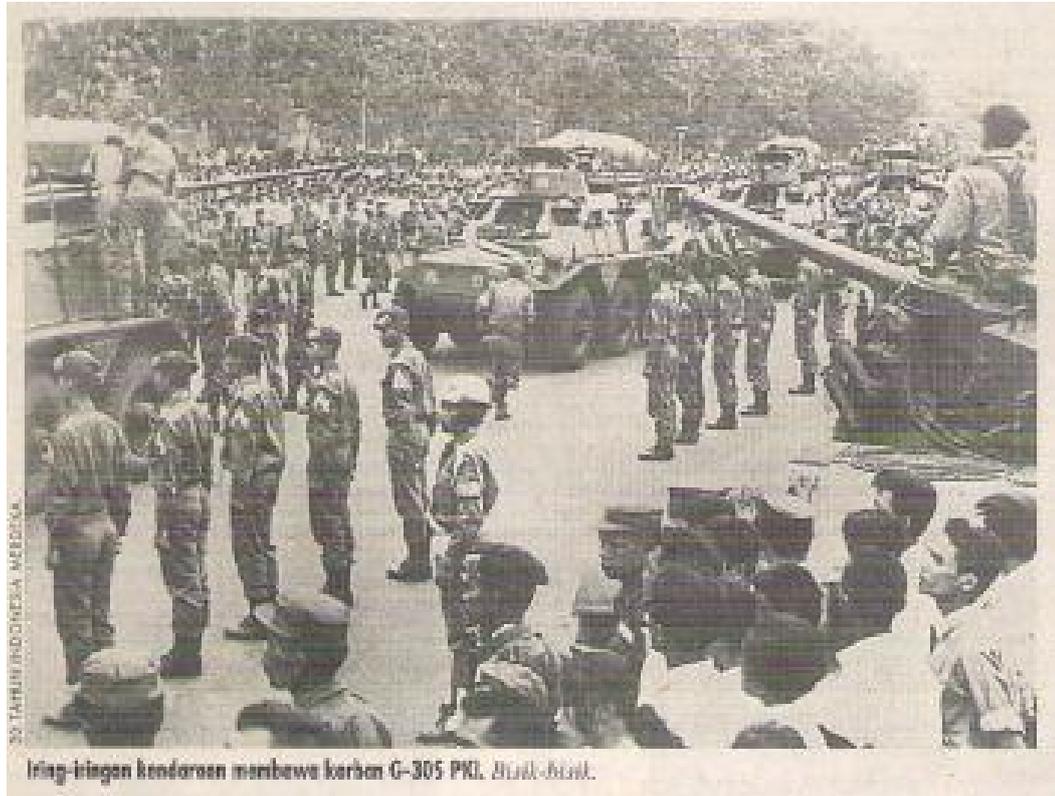
Lampiran 6

Pengangkatan Jenazah dari sebuah sumur di Lubang Buaya



Lampiran 7

Iring-iringan kendaraan membawa korban Gerakan 30 September



Lampiran 8

Tampak Mayjen Soeharto di sebelah kanan pada saat pemakaman para pahlawan revolusi



Lampiran 9

Suasana demonstasi ribuan massa menuntut pembubaran PKI



Sumber : 30 Tahun Indonesia Merdeka

Lampiran 10

Seorang simpatisan PKI diinterogasi dibawah todongan senjata api oleh pihak militer di Jakarta, pada 11 November 1965



Lampiran 11

Presiden Soekarno menyampaikan pidato Nawaksara yang kemudian ditolak oleh MPRS tanggal 22 Juni 1966 di depan Sidang Umum ke-IV MPRS



Lampiran 12

Teks Supersemar yang palsu, sedangkan yang asli, hingga kini tidak ditemukan



Lampiran 13

Pengambilan sumpah dan pelantikan Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Istimewa MPRS, 11 Maret 1967, di Jakarta.

Menerima Ucapan selamat dari Ketua MPRS Jenderal AH Nasution serta anggota pimpinan lainnya (bawah)



Lampiran 14

Soeharto ketika diambil sumpahnya pada pelantikan dirinya sebagai Presiden kedua RI



Lampiran 15

Dekrit No. 1 tentang pembentukan Dewan Revolusi Indonesia

DEKRIT No. I

TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN REVOLUSI INDONESIA

- I. Demi keselamatan Negara Republik Indonesia, demi pengamanan pelaksanaan Pantjasila dan Pantja Azimat Revolusi seluruhnja, demi keselamatan Angkatan Darat dan keselamatan Angkatan Bersendjata pada umumnya, pada waktu tengah malam hari Kamis tgl. 30 September 1965 di Ibukota Republik Indonesia Djakarta telah dilangsungkan gerakan pembersihan terhadap anggauta² apa jang menamakan dirinja “Dewan Djendral” jang telah merentjanakan coup mendjelang Hari Angkatan Bersendjata 5 Oktober 1965. Sedjumlah Djendral telah ditangkap, alat komunikasi dan objek² vital lainnja di Ibukota telah djatuh sepenuhnya kedalam kekuasaan Gerakan 30 September. Gerakan 30 September adalah gerakan se-mata² dalam tubuh Angkatan Darat untuk mengachiri perbuatan se-wenang² Djendral² anggauta “Dewan Djendral” serta perwira² lainnja jang mendjadi kakitangan dan simpatisan anggauta “Dewan Djendral”. Gerakan ini dibantu oleh pasukan² bersendjata diluar Angkatan Darat.
- II. Untuk melantjarkan tindak landjut dari pada tindakan Gerakan 30 September 1965 maka oleh Pimpinan Gerakan 30 September akan dibentuk Dewan Revolusi Indonesia jang anggauta²nja terdiri dari orang² sipil dan orang² militer jang mendukung Gerakan 30 September tanpa reserve. Untuk sementara waktu mendjelang pemilihan umum Madjelis Permusjawaratan Rakjat sesuai dengan U.U.D. 1945 Dewan Revolusi Indonesia mendjadi sumber dari pada segala kekuasaan dalam Negara Republik Indonesia. Dewan Revolusi Indonesia adalah alat bagi seluruh Bangsa Indonesia untuk mewujudkan Pantjasila dan Pantja Azimat Revolusi seluruhnja. Dewan Revolusi Indonesia dalam kegiatannja sehari² akan diwakili oleh Presidium Dewan jang terdiri dari Komandan dan Wakil² Komandan Gerakan 30 September.
- III. Dengan djatuhnja segenap kekuasaan Negara ke Dewan Revolusi Indonesia maka Kabinet Dwikora dengan sendirinja berstatus demisioner. Sampai pembentukan Dewan Menteri baru oleh Dewan Revolusi Indonesia, para bekas menteri diwadajibkan melakukan pekerdjaan² jang rutin, mendjaga ketertiban dalam Departemen masing², dilarang melakukan pengangkatan pegawai baru dan dilarang mengambil tindakan jang bisa berakibat luas. Semua bekas menteri berkewadajiban

- memberikan pertanggung jawaban kepada Dewan Revolusi Indonesia c.q. menteri² baru yang akan ditetapkan oleh Dewan Revolusi Indonesia.
- IV. Sebagai alat dari pada Dewan Revolusi Indonesia di daerah dibentuk Dewan Revolusi Propinsi (paling banyak 25 orang), Dewan Revolusi Kabupaten (paling banyak 15 orang), Dewan Revolusi Kecamatan (paling banyak 10 orang) dan Dewan Revolusi Desa (paling banyak 7 orang) terdiri dari orang² sipil dan militer yang mendukung Gerakan 30 September tanpa reserve. Dewan² Revolusi daerah ini adalah kekuasaan tertinggi untuk daerah yang bersangkutan, dan yang di Propinsi dan Kabupaten pekerjaannya dibantu oleh Badan Pemerintah Harian (B.P.H.) masing² sedang di kecamatan dan desa dibantu oleh pimpinan Front Nasional setempat yang terdiri dari orang² yang mendukung Gerakan 30 September tanpa reserve.
- V. Presidium Dewan Revolusi Indonesia terdiri dari Komandan dan Wakil² Komandan Gerakan 30 September, Komandan dan Wakil² Komandan Gerakan 30 September adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Revolusi Indonesia.
- VI. Segera sesudah pembentukan Dewan Revolusi Daerah, Ketua Dewan Revolusi yang bersangkutan harus melaporkan kepada Dewan Revolusi setingkat di atasnya tentang susunan lengkap anggota dewan. Dewan² Revolusi Propinsi harus mendapat pengesahan tertulis dari Presidium Dewan Revolusi Indonesia. Dewan Revolusi Kabupaten harus mendapat pengesahan tertulis dari Dewan Revolusi Propinsi, dan Dewan Revolusi Kecamatan dan Desa harus mendapat pengesahan tertulis dari Dewan Revolusi Kabupaten.

Djakarta, 1 Oktober 1965

Komando Gerakan 30 September:

Komandan : Letkol. Untung
 Wk. Komandan : Brigdjen Supardjo
 Wk. Komandan : Letkol. Udara Heru
 Wk. Komandan : Kol. Laut Sunardi
 Wk. Komandan : Adj. Kombes Pol. Anwas

Diumumkan oleh Bagian Penerangan Gerakan 30 September pada tgl. 1 Oktober 1965. (Harian Rakjat tgl. 2 Oktober 1965).

Lampiran 16

Keputusan mengenai susunan Dewan Revolusi Indonesia

KEPUTUSAN No. I

TENTANG SUSUNAN DEWAN REVOLUSI INDONESIA

- I. Memenuhi Dekrit No. I tentang pembentukan Dewan Revolusi Indonesia, maka dengan ini diutamakan anggota² lengkap dari Dewan Revolusi Indonesia :
1. Letkol. Untung Ketua Dewan, 2. Brigdjen. Soepardjo Wk. Ketua Dewan, 3. Letkol. Udara Heru. Wk. Ketua Dewan, 4. Kol. Laut Sunardi. Wk. Ketua Dewan, 5. Adjun Kombes. Pol. Anas. Wk. Ketua Dewan, 6. Omar Dani, Laksamana Madya Udara, 7. Soetjipto Judodihardjo, Inspektur Djendral Polisi, 8. E. Martadinata, Laksamana Madya Laut, 9. Dr. Soebandrio, 10. Dr. J. Leimena, 11. Ir. Soerachman (golongan Nasionalis), 12. Fatah Jasin (golongan Agama), 13. Kjai H. Siradjuddin Abbas (golongan Agama), 14. Tjugito (golongan Komunis), 15. Arudji Kartawinata, 16. Siauwi Giok Tjhan, 17. Soemarno S.H. 18. Hartono Major Djendral K.K.O. 19. Soetarto Brig. Djendral Polisi, 20. Zaini Mansur (Front Pemuda Pusat), 21. Jahja S.H. (Front Pemuda Pusat), 22. Soekatno (Front Pemuda Pusat), 23. Bambang Kusnohadi (P.P.M.I.), 24. Rachman (Wakil Sekdjen. Front Nasional), 25. Hardojo (Mahasiswa), 26. Basuki Rachmat Major Djendral, 27. Ryacudu Brig. Djendral, 28. Solichin Brig. Djendral, 29. Amir Machmud Brig. Djendral, 30. Andi Rivai Brig. Djendral, 31. Sujono Major Udara, 32. Leo Wattimena Komodor Udara, 33. Dr. Utami Surjadarma, 34. A. Latief Kolonel, 35. Umar Wiranatakusumah Maj. Djendral, 36. Nj. Supeni, 37. Nj. Mahmudah Mawardi, 38. Nj. Soeharti Soewarto, 39. Fatah Kol, 40. Suherman Kol, 41. Samsu Sutjipto, Kol. Laut, 42. Suhardi Wartawan, 43. Drs Soemarsono

Kombes Polisi, 44. Djunta Suwardi, 45. Karim D.P. Persatuan Wartawan Indonesia.

- II. Ketua dan Wakil² Ketua Dewan merupakan Presidium Dewan Revolusi Indonesia yang diantara dua sidang lengkap Dewan bertindak atas nama Dewan.
- III. Semua anggauta Dewan Revolusi Indonesia dari kalangan sipil diberi hak memakai tanda pangkat militer Letkol., atau setingkat. Anggauta Dewan Revolusi Indonesia dari kalangan Angkatan Bersendjata tetap dengan pangkat yang lama, ketjuali yang lebih tinggi dari Letkol. diharuskan memakai yang sama dengan pangkat Komandan Gerakan 30 September, jaitu Letkol. atau setingkat.

Komando Gerakan 30 September 1965.

Ketua Dewan Revolusi Indonesia,

tertanda

Letkol. UNTUNG

Djakarta, 1 Oktober 1965.

Diumumkan oleh Bagian Penerangan Gerakan 30 September pada tgl. 1 Oktober 1965. (Harian Rakjat tgl. 2 Oktober 1965).

Lampiran 17

Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar
Revolusi No. : 1/3/1966 mengenai pembubaran PKI

**Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/
Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi**

No. : 1/3/1966

M e n i m b a n g :

1. Bahwa pada waktu jang achir² ini makin terasa kembali aksi² gelap jang dilakukan oleh sisa² kekuatan kontra revolusi Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.
2. Bahwa aksi² gelap itu berupa penjebaran fitnah, hasutan, desas-desus, adu domba dan usaha penjusunan kekuatan bersendjata jang mengakibatkan terganggunja kembali keamanan Rakjat dan ketertiban.
3. Bahwa aksi² gelap tersebut njata² membahajakan djalannja Revolusi pada umumnja dan mengganggu penjelesaian tingkatan Revolusi dewasa ini, chususnja penanggulangan kesulitan ekonomi dan pengganjangan Nekolim Malaysia.
4. Bahwa demi tetap terkonsolidasinja persatuan dan kesatuan segenap kekuatan progresip revolusioner Rakjat Indonesia dan demi pengamanan djalannja Revolusi Indonesia jang anti feodalisme, anti kapitalisme, anti Nekolim dan menudju terwujudnja masjarakat adil makmur berdasarkan pantjasila, masjarakat Sosialis Indonesia, perlu mengambil tindakan jang tepat, tjepat dan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia.

M e m p e r h a t i k a n :

Hasil² pemeriksaan serta keputusan Mahkamah Militer Luar Biasa terhadap tokoh² "Gerakan 30 September"/Partai Komunis Indonesia.

M e n g i n g a t :

Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Mandataris MPRS/Pimpinan Besar Revolusi tanggal 11 Maret 1966.

M e m u t u s k a n :

M e n e t a p k a n

dengan tetap berpegang pada Lima Azimat Revolusi Indonesia :

- I. Membubarkan Partai Komunis Indonesia termasuk semua bagian2 organisasinja dari tingkat pusat sampai kedaerah beserta semua organisasi jang seazas/berlindung/bernaung dibawahnja.
- II. Menjatakan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi jang terlarang diseluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia.
- III. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 12 Maret 1966

Presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS/

Pemimpin Besar Revolusi

Atas nama beliau

Ttd.

SOEHARTO

Letnan Djendral TNI.

Lampiran 18

Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno dan pengangkatan Pengemban Tap MPRS Nomor IX/MPRS/1966 (Jenderal Soeharto) sebagai Pejabat Presiden

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
No.XXXIII/MPRS/1967

TENTANG

PENCABUTAN KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA
DARI PRESIDEN SUKARNO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa keseluruhan Pidato Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada tanggal 22 Juni 1966 yang berjudul "Nawaksara" dan Surat Presiden Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tertanggal 10 Januari No. 01/Pers/1967 tentang Pelengkap Nawaksara, tidak memenuhi harapan Rakyat pada umumnya, Anggota-anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada khususnya, karena tidak memuat secara jelas pertanggung-jawab tentang kebijaksanaan Presiden mengenai pemberontakan kontra revolusi G.30.S/PKI beserta epilognya, kemunduran ekonomi dan kemerosotan aklak.
- b. bahwa Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara telah menyerahkan kekuasaan Pemerintahan Negara kepada Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 seperti yang dinyatakannya dalam Pengumuman Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tanggal 20 Pebruari 1967.
- c. bahwa berdasarkan laporan tertulis Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban/Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 dalam suratnya No. R.032/'67 tanggal 1 Pebruari 1967, yang dilengkapi dengan pidato laporannya dihadapan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara berpendapat, bahwa ada petunjuk-petunjuk, yang Presiden Sukarno telah melakukan kebijaksanaan yang secara tidak langsung menguntungkan G.30.S/PKI.

Memperhatikan :

1. Resolusi dan Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, tanggal 9 dan 23 Pebruari 1967;
2. Pidato Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada pembukaan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara;
3. Pidato sambutan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong pada pembukaan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara;
4. Keterangan Pemerintah didepan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong pada tanggal 4 Maret 1967;
5. Pidato laporan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban/Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 dihadapan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada tanggal 7 Maret 1967.

Mengingat :

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Undang- Undang Dasar 1945 beserta Penjelasannya;
2. Keputusan Pimpinan MPRS No. 13/B/1967 tentang Penolakan Pidato Pelengkap Nawaksara.

Mendengar :

Musyawah Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tanggal 7 sampai dengan 12 Maret 1967.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KETETAPAN TENTANG PENCABUTAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA DARI PRESIDEN SUKARNO

B A B I

Pasal 1

Menyatakan, bahwa Presiden Sukarno telah tidak dapat memenuhi pertanggung-jawab konstitusional, sebagaimana layaknya kewajiban seorang Mandataris terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara), sebagai yang memberikan mandat, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 2

Menyatakan, bahwa Presiden Sukarno telah tidak dapat menjalankan haluan dan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara), sebagaimana layaknya kewajiban seorang Mandataris terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara) sebagai yang memberikan mandat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Melarang Presiden Sukarno melakukan kegiatan politik sampai dengan pemilihan umum dan sejak berlakunya Ketetapan ini menarik kembali mandate Majelis

Permusyawaratan Rakyat Sementara dari Presiden Sukarno serta segala Kekuasaan Pemerintahan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4

Menetapkan berlakunya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XV/MPRS/1966, dan mengangkat Jenderal Soeharto, Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Pejabat Presiden berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 hingga dipilihnya Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum.

Pasal 5

Pejabat Presiden tunduk dan bertanggung-jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.

BAB II

Pasal 6

Menetapkan penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr. Ir. Sukarno, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Pejabat Presiden.

BAB III

Pasal 7

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai pada tanggal 22 Pebruari 1967.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 12 Maret 1967

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

K e t u a
ttd

(Dr. A.H. NASUTION)
JENDERAL TNI

Wakil Ketua
ttd

(Osa Maliki)

Wakil Ketua
ttd

(M. Siregar)

Wakil Ketua
ttd

(H.M. Subchan Z.E.)

Wakil Ketua
ttd

(Mashudi)

Sesuai dengan aslinya
Pd. Sekretaris Umum MPRS
ttd

Abdulkadir Besar,SH
Letkol CKH Nrp.16315

Lampiran 19

Terjemahan telegram dari Kedubes di Indonesia untuk Departemen Dalam Negeri AS tanggal 12 Maret 1966 mengenai tanggapan AS terhadap keluarnya Supersemar yang dianggap sebagai kudeta militer yang khas

Telegram dari Kedutaan Besar

Di Indonesia untuk State Department

2579

jakarta, 12 Maret 1966, 1000Z

1. Indonesia baru saja melewati suatu kup militer yang khas. Sukarno telah lama menggunakan kekuasaannya secara berlebihan dan ia merencanakan untuk menggantikan pimpinan-pimpinan Angkatan Darat serta menempatkan orang-orang Komunis sebagai Menteri Angkatan Darat. Tindakan ini telah mendorong reaksi dari kalangan Angkatan Darat untuk mengendalikan kekuasaan Sukarno. Kup dilakukan dengan cara mempertahankan Sukarno sebagai kekuatan pemersatu dan sekaligus membangun kekuasaan Angkatan Darat. Angkatan Darat percaya bahwa kedua hal tersebut penting, sementara pada saat yang sama Suharto telah duduk sebagai orang nomor satu di KOGAM yang memiliki kekuasaan penuh.
2. Rakyat Jakarta jelas bersama Angkatan Darat. Partai-partai politik moderat dan organisasi-organisasi lainnya telah mengeluarkan pernyataan dukungannya kepada Suharto. Sementara mahasiswa, yang diarahkan oleh tentara untuk melakukan aksi, telah berhasil menciptakan suasana yang memungkinkan kegembiraan ini. Mereka saat ini sedang bersenang-senang merayakan kesuksesannya. Hari ini mereka berkeliling kota dengan berjalan kaki, menggunakan mobil-mobil truk, sambil meneriakkan slogan-slogan menentang Subandrio, Sumardjo, menentang "Kabinet Gestapu" dan menentang melonjaknya harga.
3. Saat ini semuanya tergantung pada Angkatan Darat, apakah mereka akan dapat bergerak secara cepat dan efektif untuk memantapkan posisinya. Petunjuk-petunjuk seperti itu yang terlihat dibawah ini menunjukkan bahwa mereka memang akan melakukan hal tersebut.
 - A. Parade pagi ini (septel) telah memberikan kesempatan bagi rakyat untuk mengeluarkan perasaannya setelah berminggu-minggu diliputi tumbuhnya ketegangan, dan telah membuktikan bahwa rakyat mendukung Angkatan Darat. Keseluruhan peristiwa ini telah berlangsung dengan hati-hati dan dipentaskan dengan hasil baik.
 - B. PKI dan seluruh organisasi-organisasi frontnya secara formal telah dihancurkan oleh Suharto pada sore hari ini. Walaupun tindakan ini tidak dapat diterima secara akademis karena PKI merupakan partai yang tersusun secara efektif dimatikan, tetapi pelarangan PKI merupakan isyarat yang jelas bahwa Angkatan Darat telah siap untuk menentang keinginan Sukarno yang termasyhur itu. Angkatan Darat kemungkinan juga akan menangkap

elemen-elemen PKI di Jakarta yang duduk dalam posisi penting dan selama beberapa bulan terakhir terlindungi.

4. Saat ini belum jelas apakah Angkatan Darat akan menguasai pemerintahan baru atau akan membagi kekuasaan dengan sekutu-sekutu sipilnya dari partai-partai politik anti-komunis. Walaupun begitu, koalisi yang akan terbentuk nantinya merupakan koalisi antara Angkatan Darat dan pimpinan politik moderat seperti Adam Malik, Sultan Yogyakarta dan lain sebagainya. Kelompok sebelum itu telah dilarang oleh Sukarno dan para pemimpin lebih tua, beberapa diantara mereka meringkuk dalam penjara dan beberapa dipensiunkan belaka, kemungkinan akan menjadi penasihat, tetapi kita ragu-ragu bahwa kelompok-kelompok ini akan memainkan peranan penting dalam pemerintahan akan mau membagi hasil kemenangan mereka dan menyerahkan berbagai tempat tugas penting kepada elemen-elemen ini.
5. Jika tentara bergerak untuk memantapkan posisinya, dan kita percaya bahwa mereka dapat mencapai ini, kita dapat memperkirakan langkah-langkah berikut:
 - A. Perubahan secara besar-besaran di kabinet. Subandrio telah dikeluarkan dan orang-orang pro-Komunis serta orang-orang yang tidak memiliki kemampuan akan diganti. Kabinet kemungkinan akan diperkecil dan diefisienkan. Walaupun demikian, akan terjadi kompromi dengan Sukarno yang akan berusaha mempertahankan orang-orangnya yang tidak terlalu terkenal.
 - B. Tindakan keras pada korupsi dan usaha yang dilakukan oleh Angkatan Darat untuk mendapatkan dana-dana ilegal dan banyak menteri-menteri yang terlibat dalam aktivitas ini. Akan muncul perhatian yang serius atas masalah-masalah dasar ekonomi.
 - C. Penilaian kembali dan reorientasi secara bertahap terhadap dasar kebijakan-kebijakan luar negeri yang dijalankan sebelumnya. Angkatan Darat akan menghentikan "poros" Sukarno dengan Peking. Tindakan ini akan dimulai dengan menyerang Cina sebagai langkah awal memutus "poros" ini. CONEFO sepertinya akan ditolak. Konfrontasi dengan Malaysia akan tutup buku walaupun prosesnya akan berjalan lambat. Pada saat yang sama, Angkatan Darat akan berhati-hati dalam geraknya mendekati Barat.
 - D. Penghapusan peran politik militer dan penghapusan perannya politik jenderal Angkatan Darat tidak akan disukai oleh mereka.
6. Sukarno masih tetap di pentas. Selama ia duduk dalam posisi ini, masih terdapat bahaya akan bangkitnya kembali golongan kiri. Tetapi kita percaya kesempatan untuk mengganti posisinya akan terjadi dan Angkatan Darat telah bergerak untuk tujuan ini. Jika Sukarno ditekan lebih keras lagi, di masa yang akan datang akan semakin mudah melawan dirinya.
7. Pembentukan pemerintahan dan menteri-menteri saat ini menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintahan yang semakin luas akan segera dapat dicapai. Walaupun mereka akan tetap menggunakan slogan-slogan lama, seperti instruksi Suharto hari ini (stepel). Namun, apa yang mereka lakukan tetap lebih penting ketimbang kata-kata dan ini menjadi basis awal bahwa pemerintah harus dikritik. Sejauh pemerintah AS peduli terhadap sejumlah tuntutan

mendesak (kasus Lovestand, mengizinkan kembali wartawan Amerika di Indonesia, pemberian ganti rugi atas serangan ke kedutaan AS pada tanggal 8 maret,dsb), akan menjadi ujian atas kemampuan pemerintah Indonesia. Awal minggu depan ketika situasi menjadi lebih baik kita akan mengirimkan rekomendasi kita untuk pertimbangan kebijakan yang akan diambil oleh AS.

Green

Lampiran 20

Terjemahan Dokumen CIA tanggal 6 September 1966 tentang ancaman terselubung Jenderal Soeharto terhadap Presiden Soekarno

Central Intelligence Agency

Intelligence Information Special Report

Negara : Indonesia

Tanggal : 6 September 1966

Tanggal Info : [*Beberapa kata dirahasiakan*]

Perihal: Dukungan Angkatan Darat Indonesia bagi Jenderal Soeharto untuk Mengeluarkan Ancaman Terselubung terhadap Sukarno

Sumber: [*Dua baris dirahasiakan*]

1. Dalam rapat tanggal 5 September [1966] yang berlangsung sampai pukul 02:00 dinihari, para Panglima Angkatan Darat setuju untuk mendukung Jenderal Soeharto guna menyampaikan ancaman terselubung terhadap Presiden Sukarno. Pada tanggal 3 dan 4 September para Gubernur Militer, Komandan Regional, dan para Perwira Senior AD yang lain bertemu guna membicarakan hasil dari Seminar Bandung dan mencapai kesepakatan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik AD. Rapat ini sebenarnya direncanakan untuk berakhir pada tengah hari tanggal 4 September, namun ternyata berlangsung terus sampai tanggal 4 September malam karena harus bicara mengenai bagaimana sebaiknya menangani Presiden Sukarno. Keputusan yang dicapai pada dinihari 5 September adalah: Soeharto akan menyampaikan kepada Sukarno bahwa jika ia terus-menerus bertindak untuk bertentangan dengan kehendak rakyat, AD tidak akan dapat menjamin keselamatan pribadinya. Kesepakatan ini dicapai setelah melalui perdebatan yang amat panjang. Sejumlah perwira sempat menyatakan bahwa ancaman macam itu tidak pantas, mengingat bahwa Sukarno adalah George Washingtonnya Indonesia. Sejumlah perwira lain mengatakan bahwa banyak pemimpin besar tewas dengan cara kekerasan, sambil menyebut beberapa contoh, seperti Presiden Amerika Lincoln dan Kennedy, serta Gandhi dari India. Cara yang disepakati adalah bahwa Soeharto akan menyampaikan suatu ancaman

terselubung kepada Sukarno, mendesak supaya Sukarno ikut dengan program dan kebijakan-kebijakan AD.

2. Komentar [*satu kata dirahasiakan*]: Pada tanggal 5 September [*dua baris dirahasiakan*]. Jenderal Soeharto sangat kecewa terhadap sikap pasif Jenderal Nasution sebagai Ketua MPRS, suatu lembaga yang berhak menegur atau memperkarakan (*impeach*) Sukarno yang tidak tunduk pada keputusan-keputusan MPRS. [*Satu setengah baris dirahasiakan*] membenarkan pada tanggal 4 September yang maksud utamanya adalah membahas cara-cara mengatasi masalah-masalah politik yang menghambat perbaikan ekonomi direncanakan selesai tengah hari namun ternyata harus dilanjutkan lagi sampai malam.
3. (Komentar [*satu kata dirahasiakan*]): Mungkin saja Soeharto akan berjalan diluar hukum dalam menangani masalah Sukarno dengan maksud untuk menekan Sukarno, namun kecil kemungkinan bahwa Soeharto akan menyerang Sukarno secara fisik jika tekanan itu tidak berhasil. [*Satu setengah baris dirahasiakan*] tidak dapat menyatakan apa yang akan terjadi jika Sukarno mengabaikan ancaman Soeharto).
4. Distribusi [*satu kata dirahasiakan*]: Kementerian Luar Negeri (hanya Dubes).

[*Beberapa kata dirahasiakan*]

Distribusi: Direktur CIA
 Asisten Khusus Presiden
 Direktur Intelligence and Research
 (Kementerian LN)
 Deputi Direktur untuk Intelijen
 Direktur, Office of National Estimate
 Direktur, Office of Current Intelligence

Lampiran 21

Isi Dokumen Gilchrist dan terjemahannya

Gilchrist Document

I discussed with the American Ambassador the questions set out in your No.:67786/65. The Ambassador agreed in principal [*sic*] with our position but asked for time to investigate certain aspects of the matter. To my question on the possible influence of Bunker's visit, to Jakarta, the Ambassador state [*sic*] that he saw no reason for changing our joint plans. On the contrary, the visit of the US. President's personal envoy would give us more time to prepare the operation the utmost detail [*sic*]. The Ambassador felt that further measures were necessary to bring our efforts into closer alignment. In this connection, he said that it would be useful to impress again on our local army friends that extreme care discipline [*sic*] and coordination of action were essential for the success of our enterprise. I promised to take all necessary measures. I will report my own views personally in due course.

GILCHRIST

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Saya mendiskusikan dengan Duta Besar Amerika Serikat tentang pertanyaan yang tertera pada No: 67786/65. Pada dasarnya Duta Besar setuju dengan posisi kita, tetapi meminta waktu untuk menyelidiki aspek-aspek tertentu dari masalah ini. Menjawab pertanyaan saya tentang kemungkinan pengaruh kunjungan Bunker ke Jakarta, Duta Besar tidak melihat alasan untuk mengubah rencana bersama kita. Sebaliknya, kunjungan utusan pribadi Presiden Amerika Serikat akan memberi kita lebih banyak waktu untuk mempersiapkan operasi yang sangat detail. Duta Besar merasa bahwa diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk membawa usaha kita menjadi lebih selaras. Dalam hubungan ini, ia mengatakan bahwa akan berguna [bagi kita] untuk memberitahukan lagi kepada sahabat tentara lokal kita bahwa disiplin dan koordinasi tindakan sangat penting bagi keberhasilan rencana kita. Saya berjanji untuk mengambil semua langkah yang diperlukan. Saya akan melaporkan pandangan pribadi saya pada waktunya nanti.

GILCHRIST